



INDUSTRIAL  
FIELD



TRADE  
FIELD

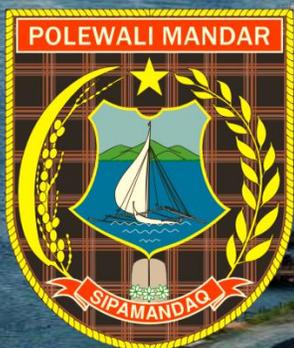


COOPERATIVE  
FIELD



COSTUMER  
PROTECTION  
FIELD

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP 2022



DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## KATA PENGANTAR

“Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Penyusunan LAKIP ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2022 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi berbagai program kerja pada tahun 2022, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Visi, Misi dan Strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih juga LAKIP ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini jauh dari sempurna mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya. Namun berkat adanya kordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Bidang-Bidang yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar, maka hasil LAKIP ini dapat diselesaikan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Polewali, 10 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN**

**UKM**  


**ANDI CHANDRA SIGIT, ST., MAP**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19680714 200604 1 013**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Maksud dan Tujuan .....	
1.3 Dasar Hukum.....	
1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	
1.5 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	
1.6 Isu Strategis Organisasi.....	
1.7 Sistematika .....	
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	
2.1 Rencana Strategis Organisasi .....	
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	
2.3 Penetapan Kinerja .....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	
3.1 Akuntabilitas Kinerja .....	
3.2 Pencapaian Tujuan .....	
3.3 Analisis Capaian Kinerja .....	
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
4.1 Kesimpulan .....	
4.2 Saran .....	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2022 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja tahunan Tahun 2022 telah ditetapkan 6 (Enam) Program dan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.846.669.156 Dengan rincian sebagai berikut:

### **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.3.983.565.356 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.936.005.957 atau 98,81%

2. **Program Pegawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.45.600.000 dengan realisasi anggaran Rp.45.596.900 atau 99,99%.

3. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.45.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.45.600.000 atau 100%.

### **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perdagangan**

4. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, dengan alokasi anggaran untuk program ini Rp.91.200.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.91.088.700 atau 99,88%.

5. **Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.230.844.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 230.844.000 atau 100%.

### **Perindustrian**

6. **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.449.859.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.449.818.180 atau 99,99%

Adapun sasaran strategis dan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2022 sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	5.00%	5.33%	106.6%
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	5.00%	3.30%	66 %
3	Meningkatnya kemandirian dan akuntabilitas koperasi	Persentase koperasi yang aktif dan sehat	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang terstandarisasi dan memiliki legalitas usaha	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
<b>KINERJA RATA-RATA</b>					<b>94.52%</b>

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 4.846.669.156,-** dan terealisasi **Rp. 4.798.953.737,-** atau persentase realisasi **99,02%**. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar **94,52%** Kondisi ini memperlihatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar Rp.4.798.953.737.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented govermet). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Asas Akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran, pemerintah daerah menyusun LAKIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Restra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan meliputi pada semua aspek kegiatan, aspek,managerial, teknis dan keuangan.

Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan

kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini.

Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Diperindagkop UKM) Kabupaten Polewali Mandar, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran 2022 merupakan bagian dari pertanggung jawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA Pembangunan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang mencakup Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM oleh karna penyusunan laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 : Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355 ) ;

- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
- h. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar.

#### **1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Aspek-aspek strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri lokal dan pengembangan industri kluster serta optimalisasi pemasaran sentra-sentra industri potensial;
2. Peningkatan peran industri kecil dan menengah dalam kegiatan industri besar serta perlunya peningkatan penggunaan bahan baku lokal;
3. Mendorong pembentukan lembaga yang memberikan perlindungan konsumen dalam rangka pengembangan tertib niaga dan perlindungan konsumen;
4. Peningkatan kelancaran sistem distribusi, perdagangan dan kurangnya daya saing komoditas perdagangan dalam mencari pangsa pasar serta belum adanya penyebaran informasi perdagangan local baik di dalam maupun luar negeri khususnya yang berorientasi peningkatan nilai tambah dan ekspor;
5. Perlunya jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif dan unit-unit perdagangan serta produk unggulan yang berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan;
6. Pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatnya partisipasi pedagang ekonomi lemah;
7. Peningkatan sarana prasarana pasar tradisional yang dikelola pemerintah kabupaten;
8. Optimalisasi pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di tempat-tempat terjadinya transaksi penggunaan alat UTTP.

## **SEKRETARIAT**

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BIDANG INDUSTRI**

Lebih lanjut pada pasal 7 ayat (1) menyatakan : Bidang Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan industri;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan industri;
- c. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman;
- d. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan industri non makanan dan minuman;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan industri;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan industri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BIDANG PERDAGANGAN**

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, menjelaskan yang pada pokoknya Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan perdagangan. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- c. penyelenggaraan pembinaan usaha perdagangan;
- d. penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan perdagangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BIDANG STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyelenggarakan standarisasi perlindungan konsumen. Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis standarisasi perlindungan konsumen;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional standarisasi perlindungan konsumen;
- c. penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- d. penyelenggaraan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis standarisasi perlindungan konsumen;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan standarisasi perlindungan konsumen; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

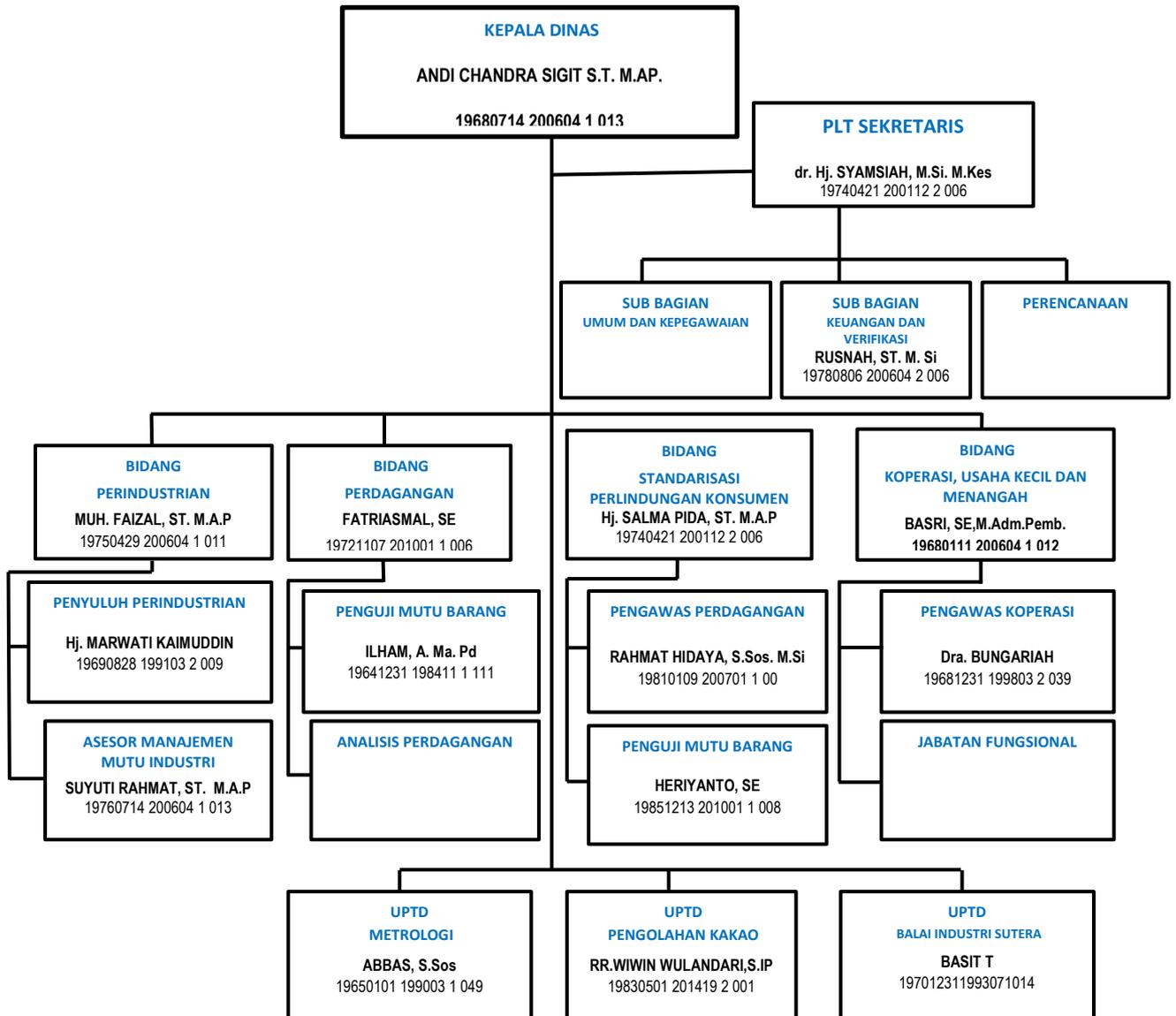
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan usaha kecil dan menengah;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

#### DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

##### KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif, responsif, tanggap dan aspiratif serta yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap serta organisasi dan manajemen yang kondusif. Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan data bulan Januari 2022 jumlah pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah 38 orang terdiri dari Pejabat Struktural Orang dan Staf Oprasional Orang.

Tabel . 1. 1

Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	TAHUN	
		2021	2022
1	S.3		
2	S.2	8	9
3	S.1	19	17
4	DIPLOMA	4	3
5	SMA/SLTA	8	9
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>38</b>

Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2

Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN	
		2021	2022
1	LAKI-LAKI	22	21
2	PEREMPUAN	17	17
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>38</b>

Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 27 s/d 57 tahun.

## 1.6 isu Strategis Organisasi

Percanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar Tahun 2020-2024 mempunyai sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pembangunan ekonomi daerah
2. Terpenuhinya perlindungan dan hak – hak konsumen
3. Meningkatnya kontribusi industri terhadap perkembangan ekonomi daerah
4. Meningkatnya peran Koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan sektor riil
5. Meningkatnya kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah
6. Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penggerak masyarakat dalam melakukan usaha produksi di bidang industri pengolahan/manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan mampu berdaya saing.

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah membantu Kepala Daerah (Bupati) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis agar dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat pelaku usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis kondisi internal dan eksternal terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan fungsi pelayanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **1.7 Sistematika**

Sistematika merupakan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1 .1. Latar Belakang
- 1 . 2. Maksud dan Tujuan
- 1 .3. Dasar Hukum
- 1 .4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- 1 .5. Isu Strategis Organisasi
- 1 .6. Sistematika

### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2 .1. Rencana Strategis Organisasi
  - 2.1.1. Visi
  - 2.1.2. Misi
2. 2. Penetapan Kinerja

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

3. 1 . Akuntabilitas Kinerja
3. 2. Pencapaian Tujuan
3. 3. Analisis Capaian Kinerja

### **BAB IV. PENUTUP**

4. 1. Kesimpulan
4. 2. Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PEMBAGIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Organisasi**

Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi.

Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif” . Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai.

Disamping itu, Rencana Strategis mengundang visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 sebagai berikut:

##### **2.1.1. Visi**

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah **“Polewali Mandar maju, Rakyat Sejahtera”**

Visi diatas mengandung makna yang menunjukkan keseimbangan aspek yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

**Maju** : Mempunyai Kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandaid dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.

Rakyat sejahtera : Kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, nyaman dan bahagia (*marendeng anna masagena*) dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama budaya dengan baik

### 2.1.2 Misi

Upaya –upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah
3. Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas yang Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan.
4. Memanfaatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

Perencanaan strategis merupakan perencanaan pencapaian target untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar Tahun 2019-2024 mempunyai sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya daya saing usaha industri pengelolaan dan perdagangan
2. Meningkatnya kualitas manajemen Perkantoran
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

Sasaran strategis tersebut memiliki 5 indikator kinerja dengan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun perencanaan 2019-2024 secara lengkap sebagaimana terlampir. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 dengan mengambil target tahun 2022.

Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan

menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut:



	Pembinaan Dan pendampingan Industri Kecil Menengah Makanan Dan Minuman	Jumlah kelompok IKM yang mampu Meningkatkan produk olahan makanan dan minuman yang Berdaya Saing	1,457	222	199,835,000	249	450,000,000	292	487,000,000	322	490,000,000	372	500,000,000	1,457	545,000,000
	Pembinaan Dan Pendampingan industri Kecil Non Makanan dan Minuman	Jumlah kelompok IKM yang mampu Meningkatkan produk olahan Non makanan dan minuman yang Berdaya Saing	4,782	717	185,144,000	812	459,000,000	956	500,000,000	1,195	505,000,000	1,102	584,000,000	4,782	586,000,000
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan an Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Industri Kecil Menengah (IKM) yang disediakan	70	12	1,999,979,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,600,000,000	12	1,600,000,000	54	1,650,000,000
2.1.1.2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75.56%	16.53%	100,000,000	17.80%	104,000,000	18.22%	108,000,000	19.49%	113,000,000	19.92%	117,000,000	91.95%	122,000,000
	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang bertambah Asset dan Anggotanya	183	39	100,000,000	42	104,000,000	42	108,000,000	43	113,000,000	46	117,000,000		122,000,000
2.1.1.3	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang:													
		- Usaha baru (UM=6.312)	15.00%	15.00%	59,942,200	11.20%	100,000,000	13.40%	150,000,000	15.60%	175,000,000	20.00%	200,000,000		250,000,000
		- Mikro - kecil (UMN=1.236)	16.00%	16.00%		8.00%		11.00%		14.00%		20.00%			
		- Kecil - menengah	9.00%	9.00%		3.60%		5.40%		7.20%		10.00%			
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang Tumbuh dan berkembang	36,759	480	25,000,000	530	35,000,000	550	55,000,000	600	60,000,000	675	85,000,000	2,835	100,000,000
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Jumlah jenis produk UMKM yang Terpromosi	30	32	34,942,200	35	65,000,000	37	95,000,000	40	115,000,000	42	115,000,000	42	150,000,000

2.1.1.4	Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	-	2.63%	2,933,115,000	5.26%	2,963,000,000	13.16%	3,058,000,000	21.05%	3,191,000,000	26.32%	3,301,000,000	68%	3,420,000,000
	Pembangunan Pasar Rayat	Jumlah Pasar Rakyat yg dibangun	30	5	2,733,115,000	5	1,800,000,000	5	1,825,000,000	5	1,830,000,000	5	1,850,000,000	25	1,875,000,000
	Revitalisasi Manajemen Pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi manajemennya	-	1		2	400,000,000	2	420,000,000	2	430,000,000	2	450,000,000	9	460,000,000
	Kemitraan Pelaku Usaha Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	5	15	50,000,000	30	250,000,000	35	270,000,000	10	300,000,000	15	325,000,000	105	330,000,000
	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan	10	10	-	15	150,000,000	15	175,000,000	20	200,000,000	20	210,000,000	80	220,000,000
	Pembinaan dan Penataan Pedagang	Jumlah Pedagang : -Pedagang Baru - Pedagang lama	13	25	150,000,000	35	363,000,000	40	368,000,000	45	431,000,000	50	466,000,000	195	535,000,000
2.1.1.5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	20.00%	25.00%	259,000,000	32.00%	262,000,000	48.00%	271,000,000	65.00%	283,000,000	75.00%	293,000,000	100%	304,000,000
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa yg dilakukan		90	40,000,000	100	87,000,000	125	90,000,000	150	94,000,000	175	97,000,000	640	100,000,000
	Pengelolaan Kemetrolgian	Jumlah Alat UTTP yang Ditera / Tera Ulang	10,817	1000	50,000,000	1500	125,000,000	1600	128,000,000	1800	132,000,000	2000	135,000,000	7,900	138,000,000
	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengaduan Perlindungan Konsumen yang dilayani		120	39,000,000	200	50,000,000	250	53,000,000	300	57,000,000	350	61,000,000	1,220	66,000,000

Program penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

- a. Program Manajemen Perkantoran  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan pelaporan Perangkat daerah  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan guna mendukung capaian tujuan pembangunan daerah sesuai ,masing-masing perangkat daerah.

## **2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Pada dasarnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar maka indikator yang dipakai dalam Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2  
IKU Disperindagkop dan UKM 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja Utama	Formula
1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	$\frac{\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100$
2	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	$\frac{\text{Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan} = \text{Pertumbuhan sektor perdagangan (t)} - \text{Pertumbuhan sektor perdagangan (t-1)}}{\text{Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (t-1)}} \times 100$
3	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	$\frac{\text{Jumlah IKM stakeholder atau survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey}}$
4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	<p>Hasil review Inspektorat atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AA &gt; 90-100 : Sangat Memuaskan</li> <li>- A &gt; 80-90 : Memuaskan</li> <li>- BB &gt; 70-80 : Sangat Baik</li> <li>- B &gt; 60-70 : Baik</li> <li>- CC &gt; 50-60 : Cukup</li> <li>- C &gt; 30-50 : Kurang</li> <li>- D &gt; 0-30 : Sangat Kurang</li> </ul>
5	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	<p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni keseusaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p>

### 2.3 Penetapan Kinerja

Melalui perjanjian kinerja, terwujud kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian kinerja 2022 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang disusun berdasar pada rencana strategis (Restra) 2019-2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan mempunyai 2 (dua) indikator;
  - Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
  - Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran
2. Meningkatnya kualitas Manajemen Perkantoran mempunyai 1 (satu) indikator;
  - Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja mempunyai 1 (satu) indikator;
  - Predikat SAKIP Perangkat Daerah
4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu);
  - Opini Pengelolaan keuangan perangkat daerah

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Rill tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022:



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jl. K. H. Wahid Hasyim Nomor 1 Pekkabata Kode Pos Telepon.  
0428-21423 Faks. 0428-21423

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANDI CHANDRA SIGIT, ST., MAP**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

**ANDI CHANDRA SIGIT, ST., MAP**

Pangkat : Pembina

NIP : 19680714 200604 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	6.70%	5%
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	15.52%	5%
3	Meningkatnya kemandirian dan akuntabilitas koperasi	Persentase koperasi yang aktif dan sehat	87.23%	100%
4	Meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang terstandarisasi dan memiliki legalitas usaha	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,978,288,043	APBD
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 45,600,000	APBD
3	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 45,600,000	APBD
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 91,200,000	APBD
5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 230,844,000	APBD
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 439,837,300	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 4,831,369,343</b>	<b>APBD</b>

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,



**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM



**ANDI CHANDRA SIGIT, ST., MAP**

Pangkat : Pembina

NIP : 19680714 200604 1 013

Namun dengan adanya wabah Covid-19 yang berimbas pada *Recofusing* atau pemotongan anggaran di tahun 2022 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan tidak berjalan dengan lancar ditahun Anggaran 2022. Seperti penurunan kualitas kinerja koperasi, berkurangnya omset penjualan dan penambahan pedagang, kegiatan validasi data dan pendataan tidak berjalan sesuai target dikarenakan kurangnya anggaran untuk pendataan dan dan validasi IKM (Industri Kecil menengah), sehingga menyebabkan fasilitas sarana kerja menjadi terbatas.

Oleh karena itu, anggaran setelah *Refocusing* yang dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2022 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.846.669.156,00,- dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Total Belanja
<b>PAGU OPD Dinas Perindagkop dan UKM</b>			<b>4.846.669.156</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.460.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.010.200
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.841.000
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.199.156.346
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.222.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.112.000
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	97.979.700
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.499.950
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.138.800
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	22.200.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	161.124.518
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik	172.229.410
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.449.000
2	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	45.596.900
3	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	45.600.000
4	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi</b>	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	41.826.100

	<b>Perdagangan</b>	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Diwilayah Kerjanya	49.262.600
5	<b>Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	91.200.000
		Penyidikan Metrologi Legal	44.725.000
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	94.919.000
6	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.647.483
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.935.500
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.000.000
7	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	105.742.800
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	334.075.380

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka pembangunan sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, maka evaluasi kinerja tersebut juga menyajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian Kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian-pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian IKU, dan kinerja sasaran (PK) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah dituangkan dalam IKU dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

#### 3.2. Pencapaian Tujuan

Suatu Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pembangunan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM diharapkan menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya, dan menciptakan lapangan kerja

yang seluas-luasnya, meningkatkan penerimaan daerah, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan keseluruhan wilayah Kabupaten Polewali Mandar, meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, masyarakat yang berdaya saing.

Dalam Tujuan jangka Menengah Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar tahun 2022, ada 4 tujuan yang kemudian ditetapkan, yaitu meliputi :

A. Tujuan

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan religius.  
Sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi, Sumber Daya manusia (SDM) yang Berkualitas dan Religius merupakan sumber daya yang terpenting untuk pencapaian sasaran organisasi. Peran SDM bagi organisasi tidak hanya dilihat dari hasil produktivitas kerjanya tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan dan kemampuan untuk memanfaatkan secara tepat sumber daya lainnya untuk kepentingan organisasi.
2. Memperkuat kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah.  
Pembangunan yang memanfaatkan Potensi unggulan wilayah dapat menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktifitas dan investasi serta membantu sektor-sektor swasta dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar
3. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat  
Salah satu sektor yang mendapat perhatian untuk dikembangkan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor industri. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah salah satu proses perubahan secara terus menerus guna meningkatkan pendapatan perkapita dan kenaikan itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat.
4. Meningkatkan daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas.  
Akselerasi pertumbuhan ekonomi cenderung masih bergerak lambat. Kondisi tersebut saja tidak terlepas dari lemahnya kinerja sektor manufaktur yang berdampak pada kian lemahnya daya saing produk dipasar.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana kinerja Tahun 2022, telah dapat dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar dengan *Performance* kinerja Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran 1 : Meningkatnya daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan capaian untuk tahun 2022 adalah :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	1. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	5.00%	5.33%	106.6%
	2. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	5.00%	3.30%	66 %

Tabel 3.2

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran capaian untuk tahun 2022 adalah :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/sta keholder	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

Tabel 3.3

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja capaian untuk tahun 2022 adalah :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Tabel 3.4

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah  
Capaian untuk tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100%

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana Program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra harus senantiasa berkorelasi dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

#### Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	3. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	5.00%	5.33%	106.6%
	4. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	5.00%	3.30%	66 %

Untuk sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator yakni Persentase laju pertumbuhan PRDB sektor industri pengolahan dan persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran.

Pada indikator “**Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan**” pencapaiannya pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 5.00% capaian realisasi sebesar 5.33% sedangkan pencapaiannya pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 11.80% capaian realisasi sebesar 5.54% atau persentase capaian sebesar 46.95%.

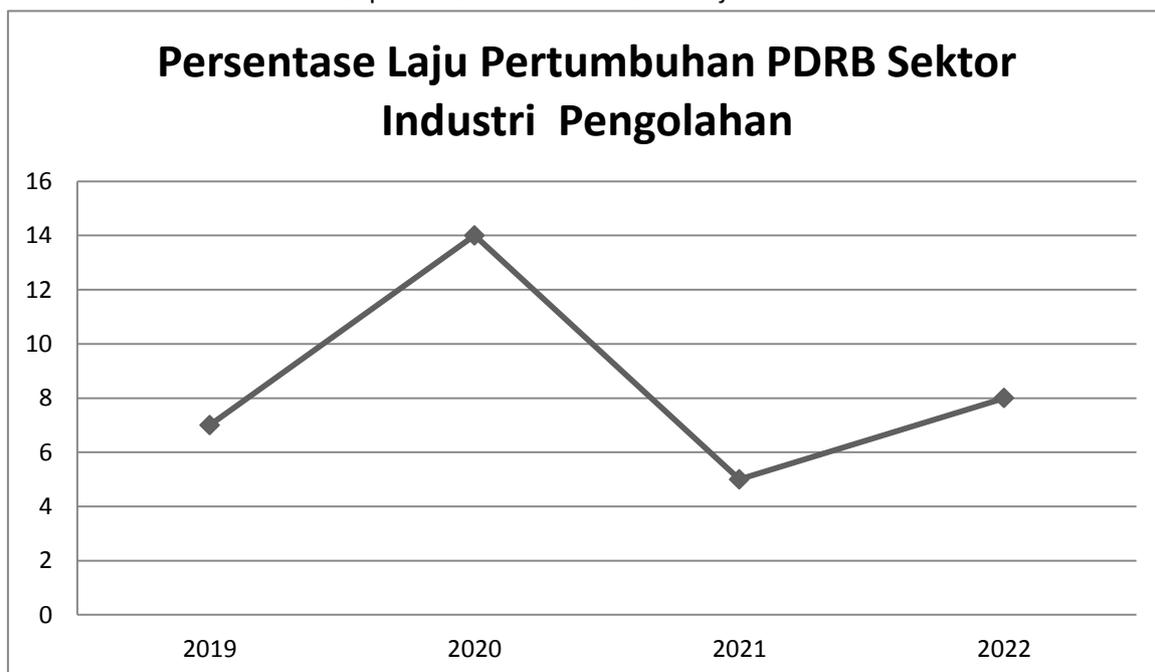
Pada indikator “**Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran**” realisasi pencapaian pada tahun 2022 adalah sebesar 3.33% dengan target 5.00% atau persentase capaian sebesar 66%. Sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 14.4 % dengan capaian realisasi sebesar 3.65 %

Dari gambaran capaian realisasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana dapat kita lihat pada line chart berikut :

#### Indikator Kinerja Sasaran I

Line Chart. 3. 1

Capaian realisasi indikator kinerja sasaran



## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Polewali Mandar.

Tantangan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Sedangkan peluang merupakan faktor eksternal yang mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mendorong tercapainya sasaran strategis yang direncanakan. Adapun tantangan dan peluang tersebut pada sasaran strategis diatas, antara lain:

Tantangan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguasaan teknologi industri pelaku industri masih rendah</li><li>2. Masih rendahnya jumlah industri pengolahan berbasis bahan baku komoditi pangan yang merupakan unggulan Daerah (27,07%)</li><li>3. Skala Industri pengolahan dominan mikro dan kecil (95%)</li><li>4. Masih rendahnya daya serap sektor industri pengolahan terhadap angkatan kerja hanya sekitar 10,36%</li><li>5. Serapan jumlah tenaga kerja disektor industri sangat kecil (10,36%)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM cukup banyak</li><li>2. Kebijakan-kebijakan kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan daya saing</li><li>3. Sumber Daya Alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan potensi industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM</li><li>4. Adanya dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha rakyat (KUR) untuk memperkuat dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</li></ol>

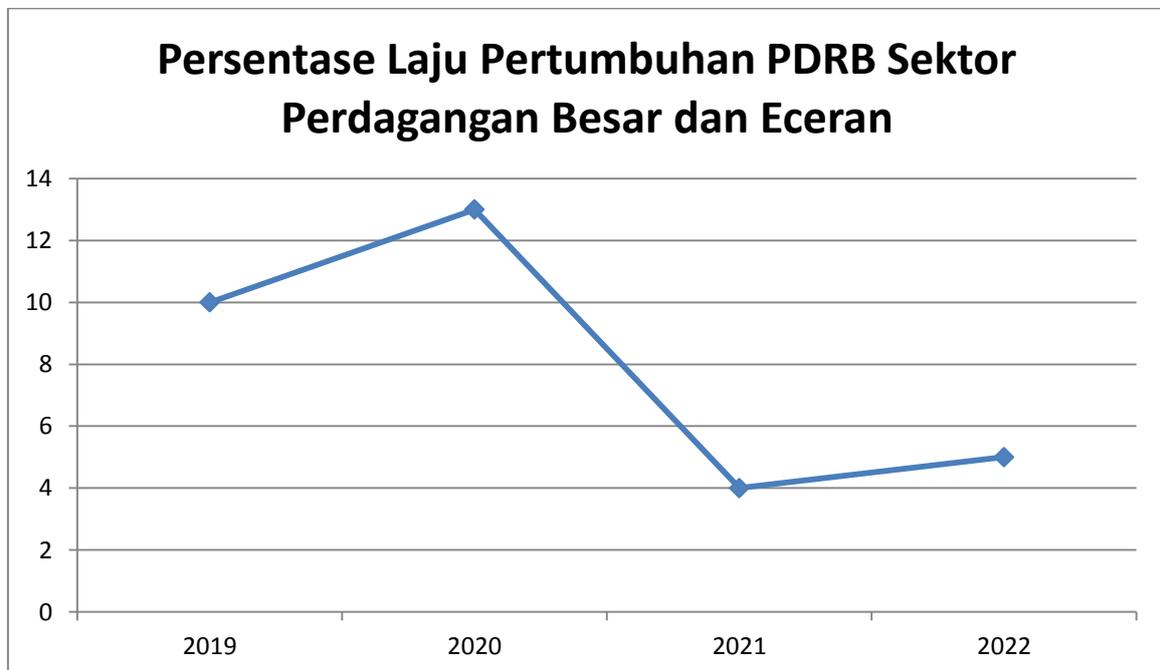
Alternatif solusi yang diupayakan :
<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengembangkan budaya industri guna mendorong kemajuan perekonomian Daerah</li><li>b. Mendorong kemandirian dan daya saing industri lokal</li><li>c. Meningkatkan daya saing Produk unggulan Daerah</li><li>d. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui proses industri dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat</li><li>e. Mengoptimalkan Koordinasi dalam rangka kerjasama peningkatan SDM, penguasaan Teknologi Industri dan Pengolahan berbasis bahan baku unggulan Daerah bagi pelaku Industri dan wirausaha baru.</li><li>f. Fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</li></ol>

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**, sebagai berikut:

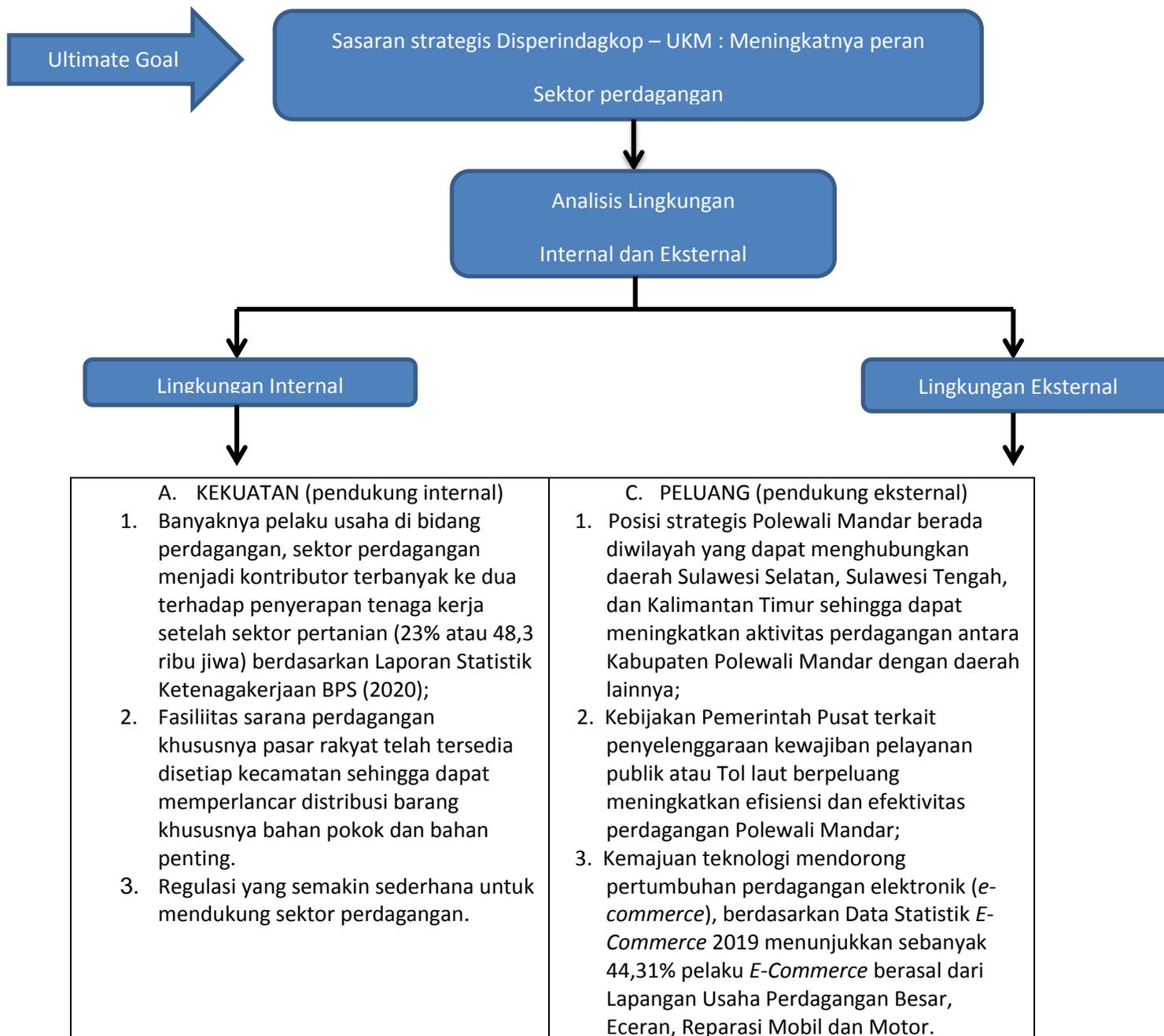
PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	99.96%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	449.859.800	449.818.180	99.99 %
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 45.600.000	Rp. 45.596.900	99.99 %
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 45.600.000	Rp. 45.600.000	100 %
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 91.200.000	Rp. 91.088.700	99.88 %

### Indikator Kinerja Sasaran II

Line Chart 3.2



Adapun tantangan dan peluang serta alternative solusi yang diupayakan dalam indikator sasaran strategis diatas, antara lain :



<p><b>B. KELEMAHAN (penghambat internal)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya daya saing usaha perdagangan yang ditandai dengan masih tingginya persentase jumlah pedagang kecil (86%);</li> <li>2. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha perdagangan yang ditandai dengan masih tingginya persentase usaha perorangan (71%);</li> <li>3. Masih belum optimalnya pemanfaatan program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (<i>public service obligation</i>) atau Tol Laut untuk meningkatkan kinerja logistic perdagangan Polewali Mandar</li> </ol>	<p><b>D. ANCAMAN (penghambat eksternal)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan;</li> <li>2. Penetrasi produk luar negeri sebagai akibat dari perdagangan bebas mengancam pertumbuhan omset pedagang lokal;</li> <li>3. Ancaman instabilitas iklim perdagangan nasional dan internasional. Contohnya situasi pandemic Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 hingga saat ini.</li> </ol>
--	---

### Matriks SWOT Bidang Perdagangan

<p>Ling. Internal</p> <p>Ling. Eksternal</p>	<p><b>Kekuatan (Strengt/S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya pelaku usaha dibidang perdagangan,</li> <li>2. Fasilitas sarana perdagangan khususnya pasar rakyat telah tersedia disetiap kecamatan;</li> <li>3. Regulasi yang semakin sederhana mendukung pertumbuhan sektor perdagangan</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (Weakness/W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya daya saing usaha perdagangan,</li> <li>2. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha perdagangan;</li> <li>3. Masih belum optimalnya pemanfaatan program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (<i>public service obligation</i>) atau Tol Laut.</li> </ol>
<p><b>Peluang (Opportunity/O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi strategis Polewali Mandar berada diwilayah yang dapat menghubungkan daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,dan Kalimantan Timur;</li> <li>2. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Tol Laut;</li> </ol>	<p><b>Strategi SO<sup>1</sup></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dalam daerah bahkan antar daerah dan antar pulau dengan memanfaatkan program Tol Laut;</li> <li>2. Mendorong pelaku usaha untuk memperluas bentuk aktivitas perdagangan, bukan hanya perdagangan konvensional tapi juga</li> </ol>	<p><b>Strategi WO<sup>3</sup></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pertumbuhan pedagang besar yang bermitra dengan pedagang kecil dengan memanfaatkan posisi strategis Polewali Mandar;</li> <li>2. Mendorong pertumbuhan pelaku usaha baru non-perorangan (badan usaha) sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan fasilitas Tol Laut baik bagi pelaku</li> </ol>

3. Kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik ( <i>e-commerce</i> ).	perdagangan elektronik.	usaha perorangan maupun usaha.
<b>Ancaman (Treats/T)</b> 1. Inflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan; 2. Persentasi produk luar negeri sebagai akibat dari perdagangan bebas mengancam pertumbuhan omset pedagang lokal; 3. Ancaman instabilitas iklim perdagangan nasional dan internasional. Contohnya situasi pandemic Covid-19 yang terjadi diawal tahun 2020 hingga saat ini.	<b>Strategi ST<sup>2</sup></b> 1. Memastikan pengawasan dan kelancaran distribusi barang untuk mencegah terjadinya inflasi yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan sektor perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas sarana perdagangan yang ada; 2. Revitalisasi pasar rakyat agar masyarakat senang berbelanja dipasar rakyat untuk mengurangi dampak penetrasi produk asing terhadap omset pedagang.	<b>Strategi WT<sup>4</sup></b> 1. Memberdayakan pedagang kecil agar perannya dalam rantai distribusi barang sebagai pengecer dapat optimal sehingga dapat mencegah dampak negatif dari inflasi; 2. Mendorong pelaku usaha yang ada untuk berorientasi ekspor sehingga dapat menjadi penyeimbang dari penetrasi produk asing.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**, sebagai berikut :

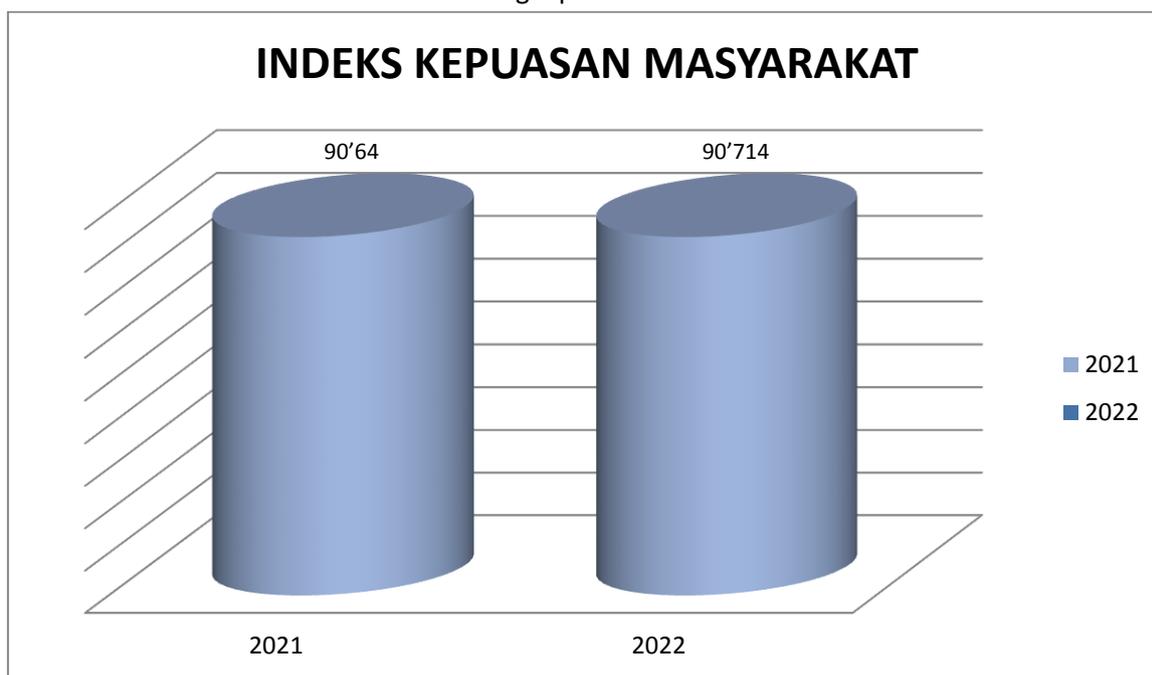
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>99,60%</b>
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 230.844.000	Rp. 230.844.000	100%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp. 3.983.565.356	Rp. 3.936.005.957	98,81%
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 449.859.800	Rp. 449.818.180	99,99%



7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	3	4	3	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	1	2	1	2	1	1	2	2	2
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	3	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	3	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	3	4	4	4	4
28	4	4	4	4	3	4	4	3	4
29	4	4	4	4	4	4	4	3	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	3	4	4	3	4	4	3	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	3	4	4	4	4	4	3	4
□Nilai /Unsur	127	126	128	128	124	128	129	124	129
NRR / unsur	3,629	3,600	3,657	3,657	3,543	3,657	3,686	3,543	3,686

NRR										*)
tertbg/ unsur	0,403	0,400	0,406	0,406	0,394	0,406	0,410	0,394	0,410	3,629
<b>Hasil Konversi IKM Unit pelayanan</b>										**) <b>90,714</b>

Chart. 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik  
Dinas Perindagkop dan UKM 2020-2021



Dapat dilihat dari perbandingan *chart* diatas hasil rata-rata skor atau indeks dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar pencapaian pada tahun 2021 dan 2022 meskipun tidak jauh beda namun ada peningkatan sebesar 0,074%. Dalam hal ini, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sadar akan perlunya meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Adapun tantangan dan peluang serta alternative solusi yang diupayakan dalam indikator sasaran strategis diatas, antara lain:

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi bangunan Gedung Kantor</li> <li>2. Yang sebagian dalam kondisi kurang layak</li> <li>3. Kondisi ruangan yang panas dan sempit</li> <li>4. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana kerja</li> <li>5. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan</li> <li>6. Kendaraan operasional sarana pelayanan masih kurang terutama roda 2</li> <li>7. Keterbatasan SDM terutama tenaga teknis termasuk PTT</li> <li>8. Area parkir roda 2 dan 4 tidak memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat area yang dapat digunakan untuk tempat parkir kendaraan</li> <li>2. Ruangan untuk pelayanan sudah tersedia</li> <li>3. Sarana gedung kantor sudah tua dan mulai lapuk sehingga sangat layak untuk dilakukan rehabilitasi</li> </ol>

<b>Alternatif solusi yang diupayakan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a Perlunya pengadaan sarana prasarana kerja</li> <li>b Pengadaan pendingin ruangan</li> <li>c Perlunya rehabilitasi gedung kantor</li> <li>d Pembangunan area parkir</li> </ol>

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**, sebagai berikut :

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.983.565.356</b>	<b>3.936.005.957</b>	<b>98.81</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.460.000	16.460.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.011.000	20.011.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.841.000	18.841.000	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.229.572.859	3.199.156.346	99.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.222.000	3.222.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.112.000	3.112.000	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.042.500	97.979.700	99.94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.500.000	18.499.950	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.141.300	11.138.800	99.98
Penyediaan Bahan Bacaan dan	22.200.000	22.200.000	100

Peraturan Perundang-Undangan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.135.000	161.124.518	99.99
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	16.000.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.548.200	172.229.410	92.82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.449.000	23.449.000	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	122.394.997	118.647.483	96.94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.935.500	14.935.500	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000	19.000.000	100

### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>100%</b>

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan *review* oleh Inspektorat.

Kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya:

1. Pembuatan atau penyusunan laporan akuntabel
2. Penyampaian laporan secara tepat waktu
3. Pengelolaan administrasi keuangan mengikuti standar sesuai aturan yang berlaku

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan</li> <li>2. Sarana dan Prasarana masih sangat kurang</li> <li>3. Pengelolaan IT yang masih sangat terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Beban tugas yang di emban semakin luas</li> <li>2. Sebagai OPD yang berposisi sebagai fasilitator bidang industri dan perdagangan bagi IKM dan UKM maka mutlak dibutuhkan sarana dan prasarana</li> <li>3. Potensi pasar bagi IKM dan UKM semakin terbuka sehingga dibutuhkan pengelolaan IT secara optimal.</li> </ol>

<b>Alternatif solusi yang diupayakan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja</li> <li>2. Penambahan personil yang memiliki basic ilmu tentang pengelolaan keuangan</li> <li>3. Penguasaan terhadap pengoprasian sarana IT bagi staf perlu ditingkatkan</li> </ol>

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**, sebagai berikut :

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.312.000</b>	<b>55.311.200</b>	<b>100</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.460.000	16.460.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.011.000	20.011.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.841.000	18.841.000	100

#### Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	WTP	WTP	100%

Pada aspek sasaran strategis ini, Opini pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dikeluarkan oleh BPK yang merupakan *output* terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk memeriksa laporan keuangan. Tujuan dipeliksanya laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan kewajaran atas laporan keuangan. Wajar atau tidaknya hasil pemeriksaan laporan keuangan ini yang kemudian melahirkan opini-opini apakah itu WTP,WDP,TW atau *disclaimer*.

Memperhatikan capaian Opini BPK dalam 2 tahun terakhir, Kabupaten Polewali Mandar selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk Tahun Anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP, Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi dalam pencapaian Opini WTP . Adapun kontribusi Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian opini WTP, antara lain :

1. Pembuatan atau penyusunan laporan yang akuntabel
2. Penyampaian laporan secara tepat waktu
3. Pengelolaan administrasi keuangan sesuai standar aturan yang berlaku

Opini WTP diberikan dengan kriteria bahwa sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atau pos-pos laporan keuangan, dengan kata lain, secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa opini WTP merupakan bentuk pernyataan atas kewajaran terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP sehingga dengan predikat WTP maka pengelolaan keuangan telah memenuhi standar-standar dalam prinsip *good governance*. Adapun tantangan dan peluang serta alternative solusi yang diupayakan dalam sasaran strategis diatas, adalah sebagai berikut :

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
1. Kontribusi OPD terhadap penilaian pada peringkat WTP perlu semakin ditingkatkan	1. Sarana IT (aplikasi yang menunjang) mengenai pengelolaan keuangan sudah tersedia dan terstandar

<b>Alternatif solusi yang diupayakan :</b>
1. Peningkatan kualitas SDM dan /atau kualitas SDM yang memiliki basis ilmu yang memadai

Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Rp.3,112,000</b>	<b>Rp.3,112,000</b>	<b>100%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 3,112,000	Rp. 3,112,000	100%

### **3.4. Akuntabilitas keuangan**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar, yang termuat dalam, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebesar Rp.4.798.953.737,- yang direalisasikan sebesar 99.02 %. Terdapat silva Rp.47.715.419,- atau 0,08, %. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan program/kegiatan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
PAGU OPD Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM			4.846.669.156	4.798.953.737	99,02
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.460.000	16.460.000	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.011.000	20.011.000	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.841.000	18.841.000	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.229.572.859	3.199.156.346	99.06
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.222.000	3.222.000	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.112.000	3.112.00	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.042.500	97.979.700	99.94
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.500.000	18.449.950	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.141.300	11.138.800	99,98
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.200.000	22.200.000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.135.000	161.124.518	99.99
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	16.000.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.548.200	172.229.410	92.82
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.449.000	23.449.000	100
		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	122.394.997	118.647.483	96.94
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.935.500	14.935.500	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	19.000.000	19.000.000	100

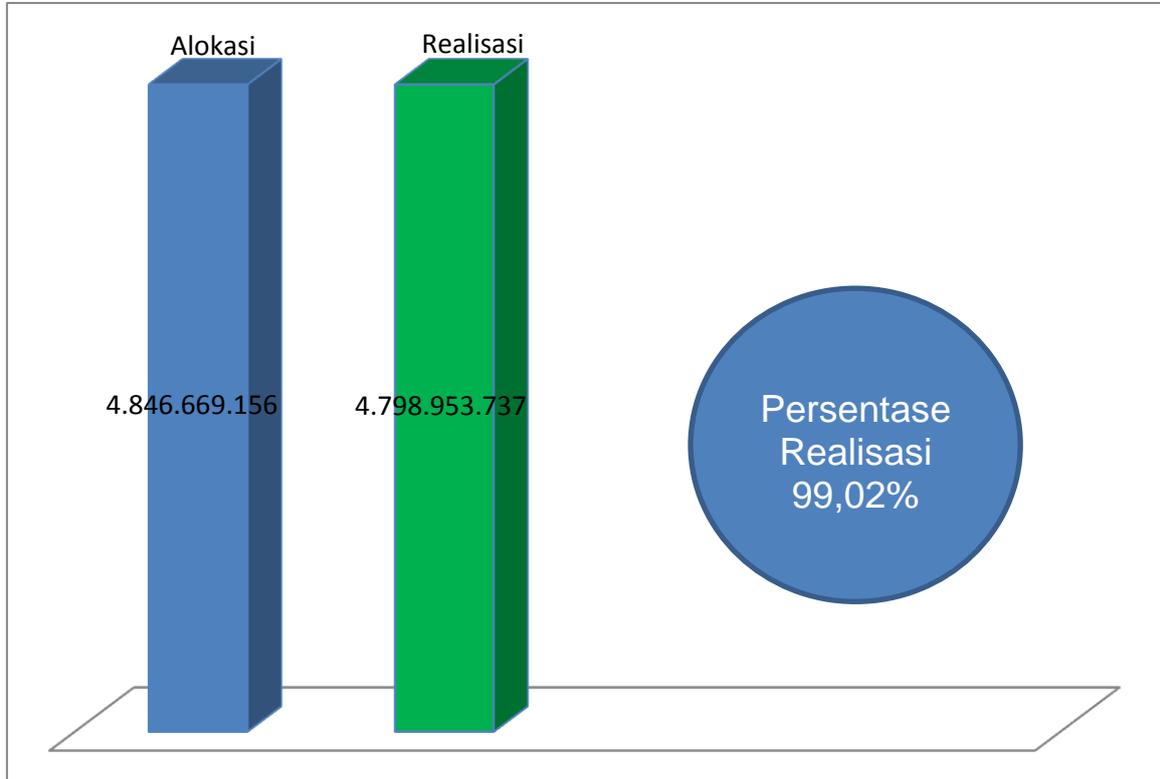
		Bangunan Lainnya			
2	<b>Program Perencanaan Dan pembangunan Industri</b>	Koordinasi,sinkronisasi, dan pelaksanaan poembangunan sarana dan prasarana industri	105.740.800	105.740.800	100
		Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	334.119.000	334.075.380	99.99
3	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	45.600.000	45.596.900	99.99
4	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	45.600.000	45.600.000	100
5	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	41.937.400	41.826.100	99.73
		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	49.262.600	49.262.600	100
6	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	Pengawasan /penyuluhan metrologi legal	94,919.000	94.919.000	100
		Penyidikan Metrologi Legal	44.725.000	44.725.000	100
		Pelaksanaan metrologi legal berupa , tera, tera ulang	91.200.000	91.200.000	100

Realisasi Sebesar 99,02% dari anggaran yang disediakan mencerminkan adanya upaya untuk lebih efektif dalam merealisasikan penggunaan anggaran oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun Alokasi dan Realisasi belanja diatas dapat disajikan sebagai berikut :

Chart. 3.4

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2022



NILAI EFISIENSI PADA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	% EFISIENSI
1	<b>Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan</b>	5.00%	5.33%	%	449,859,800	449,818,180	99,99%	110%
	1. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan							
	2. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	5.00%	3.30%	%	91,200,000	91,088,700	99,88%	60,50%
2	<b>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</b>	Sangat Baik	Sangat Baik	100	3,983,565,356	3,936,005,957	98,81	99,80%
	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder							
3	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja</b>	BB	BB	100	18,841,000	18,841,000	100%	100%
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah							
4	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	WTP	WTP	100	3,222,000	3,222,000	100%	99,82%
	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah							
<b>JUMLAH</b>				<b>74,45</b>	4,846,669,156	4,798,953,737	<b>99,02</b>	

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan yaitu pada tahun 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar mendapat Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 4,846,669,156,- dengan realisasi sebesar Rp. 4,798,953,737,-

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara Target dan realisasi 4 sasaran, yang didukung oleh kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :

1. Dari 4 sasaran pencapaian dengan 5 indikator, realisasi keuangannya adalah sebesar 99,02 % dari rencana anggaran
2. Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah Tahun 2022, menunjukkan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar 96,92%.

Tahun 2022 agar Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana, kami akan mengambil langkah-langkah dengan mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan dan mengoptimalkan kemampuan/pengetahuan Personil.

### 4.2. SARAN

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM bagi para pelaku usaha industri dan perdagangan mengenai penguasaan Teknologi Informasi.
2. Pengolahan berbasis bahan baku unggulan daerah bagi pelaku industri dan wirausaha baru serta meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui proses industri agar pendapatan masyarakat semakin meningkat.

3. Pembinaan terhadap pelaku UKM perlu ditingkatkan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan daya saing produk.
4. Pengembangan usaha perkoperasian terutama koperasi sektor rill perlu ditingkatkan.
5. Edukasi kemetrolagian terhadap para pelaku usaha baik industri, Perdagangan perlu ditingkatkan.
6. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.